

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 548 / Pid.B / 2011 / PN.Mks)

OLEH

LUKMANSYAH BASRI

B 111 07 861

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 548 / Pid.B / 2011 / PN.Mks)

Disusun dan Diajukan

Oleh

LUKMANSYAH BASRI

B 111 07 861

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana**

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 548 / Pid.B / 2011 / PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

LUKMANSYAH BASRI

B 111 07 861

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa 27 Agustus 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

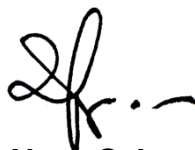
Prof. Dr. Slamet Sampurno S, S.H., M.H., DFM.

NIP. 19470915 197901 1 001

Hj. Nur Azizah, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

**An. D e k a n,
Wakil Dekan Bidang Akademik**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Lukmansyah Basri

NIM : B 111 07 861

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

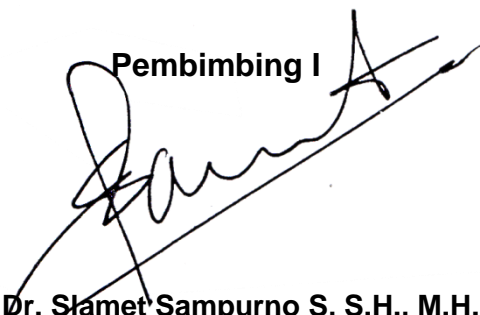
Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 548 / Pid. B / 2011 / PN. Mks)."**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2013

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Slamet Sampurno S, S.H., M.H., DFM.
NIP. 19470915 197901 1 001

Pembimbing II



Hj. Nur Azizah, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Lukmansyah Basri

NIM : B 111 07 861

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 548 / Pid. B / 2011 / PN. Mks).”

Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir Program Studi.

Makassar, Mei 2013

**a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

LUKMANSYAH BASRI (B111 07 861), “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 548 / Pid.B / 2011 / PN.Mks.)”. Di Bawah Bimbingan Slamet Sampurno S. Selaku Pembimbing I dan Haeranah Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dalam putusan perkara nomor 548 / Pid. B / 2011 / PN. Mks. dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembunuhan dalam putusan perkara nomor 548 / Pid. B / 2011 / PN. Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya di Instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat, dengan mengajukan para terdakwa ke persidangan dengan surat dakwaan yang di susun secara subsideritas alternative, dengan dakwaan pertama primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; dan (II) Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa Aladin Baso Tomo dan Nahria Abu Nonni dalam putusan perkara nomor : 548 / Pid.B / 2011 / PN.Mks dalam pertimbangan hukum oleh hakim kurang tepat menurut pendapat penulis seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman “turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua subsidair dari Jaksa Penuntut Umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran TUHAN YME yang telah memberikan curahan kasih sayang kepada penulis, penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 548/Pid.B/2011/PN.Mks.)”**.

Dalam Kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda Almarhum **Basri Baso** dan Ibunda **Asma Rauf, S.Pd.**, atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis, Kepada saudara(i) penulis Andriansyah Basri, Alamsyah Basri, Sry Hardianti Basri, dan Mustika Amma yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar atas segala bantuannya kepada penulis khususnya Almarhum Abdul Rasal Rauf, S.H., M.Phil., DFM., dan Ny. A. Sugirah Darwis, dr. Abdul Rahman Rauf, S.Po.G., dan Ny. Setiawan Basri, Amrullah Rasal Rauf, S.Sos., dan Ny. Nurul, Hj. Siti Waras, S.Pd., dan Bapak Abd. Rahman, M.Bsc., nasihat yang terus-menerus diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., beserta Wakil Rektor lainnya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Prof. Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III
4. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno S., S.H., M.H., DFM selaku Pembimbing I dan Ibu Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
6. Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membekali ilmu kepada penulis.
7. Para Nara Sumber yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini.
8. Terkhusus bagi kekasih penulis Ayu Eka Fitri (Mahasiswi Kebidanan AKBID Muhammadiyah) yang terus memotivasi penulis agar cepat sarjana.
9. Seluruh Sahabat-sahabatku Ikatan Mahasiswa Sawerigading (IMS) Unhas, Keluarga Besar Lorong Hitam, IPMA Luwu Timur, serta

seluruh angkatan 2007 yang telah bersama-sama penulis saat suka dan duka dari awal menjadi Mahasiswa dan telah banyak menghibur dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Makassar, Mei 2013

Penulis

Lukmansyah Basri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
B. Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan	12
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	12
C. Bentuk-Bentuk Pembunuhan	13
D. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	15
1. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	15
2. Bentuk Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	16

a. Pelaku (<i>Dader</i>)	16
b. Menyuruh Melakukan (<i>Doen Plegen</i>)	19
c. Turut Melakukan (<i>Mede Plegen</i>)	27
d. Membujuk atau Menggerakkan (<i>Uitlokke</i>)	29
e. Pembantuan (<i>Medeplichtigheid</i>)	30
E. Pidana dan Pemidanaan	35
1. Pengertian Pidana	35
2. Jenis-Jenis Pidana	36
3. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan	46
F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Lokasi Penelitian	53
B. Jenis dan Sumber Data	53
C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Analisis Data	54
E. Sistematika Penulisan	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Dalam Putusan Perkara Nomor 548 / Pid. B / 2011 / PN. Mks.	56
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Dalam Putusan Perkara Nomor 548 / Pid. B / 2011 / PN. Mks.	80

BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin maju dan kompleksnya zaman dan perubahan yang terjadi di segala penjuru, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan. Mulai dari hal yang positif, tentunya bukan merupakan suatu hambatan dalam kehidupan, namun hal yang negatif merupakan masalah yang butuh sesegera mungkin untuk diselesaikan, mulai dari hal yang terkecil seperti perkelahian, penganiayaan serta pembunuhan, karena hal ini pemicu atau penyebab dari semua kejadian yang ada di masyarakat.

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada. Tinjauan yuridis yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji. Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa “hukum itu ada namun harus ditemukan” (**Satjipto Rahardjo**, 2006:124). Masalah hukum sudah sangat banyak dikaji secara yuridis termasuk salah satunya adalah tindak pidana. D. Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah

tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (**Tongat**, 2008:105).

Berdasarkan hal tersebut, merupakan suatu bukti nyata Indonesia adalah negara yang berkembang dimana dalam perkembangannya juga memegang tinggi hukum sebagai alat pengawas atau pembatas. Hal ini juga berarti di Indonesia tidak menginginkan adanya negara yang berdasarkan kekuasaan semata-mata. Penegasan tersebut sengaja dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan dan norma-norma yang dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia menjadi warga yang sadar dan taat hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum kepada setiap masyarakat.

Sebagai konsekuensi ketentuan-ketentuan tersebut, maka azas kesadaran hukum merupakan azas yang harus diprioritaskan dalam pembangunan. Azas kesadaran hukum berarti menyadarkan setiap warga untuk selalu taat kepada hukum, disamping itu mewajibkan pula bagi negara beserta aparatnya untuk menegakkan dan menjamin berlakunya kepastian hukum di Indonesia. Namun hal yang selalu terjadi dengan adanya peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang baru, dapat dipastikan akan terjadi sebuah pelanggaran akan hal tersebut. Dengan kata lain, sebuah kejahatan berawal dari adanya peraturan. Disinilah peranan aparatur pemerintahan terutama instansi yang bertanggung

jawab langsung akan hal penegakan hukum perlu meningkatkan pola kerja dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat tercipta apa yang dinamakan stabilitas hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi atau penegakan hukum. Karena melalui instrument hukum, menurut **Bambang Waluyo** (2008:2) diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, tingkat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku semakin meningkat. Hal ini tampak dari banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan di semua media cetak dan elektronik. Tindak pidana pembunuhan sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu

penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, karena hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 338 sampai dengan Pasal 359 KUHP.

Seperti kejahatan lainnya yang terjadi dalam masyarakat, pembunuhan dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun secara tegas dilarang oleh norma hukum pidana, dan karenanya kaidah hukum pidana selalu bertindak tegas dan tidak pernah membiarkan berlangsungnya kejahatan tersebut secara terus menerus, karena dilihat dari segi terjadinya tindak pidana pembunuhan itu sangatlah merugikan. Kejahatan-kejahatan seperti inilah yang menjadi tugas bagi seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Instansi Kejaksaan, Pengadilan, Kehakiman dan Kepolisian.

Penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum (**Ninie Suparni**, 2007:5), yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih kepada

kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Dengan demikian, pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Hukum tidak bisa dilepaskan dengan esensinya yakni keadilan, keadilan sering disebut sebagai keutamaan hukum. Dengan meminta manusia untuk berfikir secara jernih, bertindak atas dasar kebenaran serta pertimbangan hati nurani dan keyakinan. Oleh karena itu, keadilan juga meminta manusia untuk mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya keadilan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan berfungsinya hukum, berbagai keadaan yang mencerminkan ketidakadilan dapat dihindari. Dalam hal adanya konflik kepentingan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, penyelesaiannya tidak lagi menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan dan nilai-nilai objektif yang tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah.

Hukum berlaku bagi yang lemah maupun yang kuat di depan hukum, mereka yang lemah tidak akan kalah karena kelemahannya.

Sebaliknya bagi yang kuat mereka harus mengakui, bahwa hukum merupakan “pembatas” bagi keinginannya untuk memaksakan suatu pemecahan konflik kepentingan berdasar kekuatan dan demi keuntungannya sendiri.

Dalam konteks kekuasaan, hukum dengan esensi keadilannya berfungsi untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Adanya tatanan hukum yang mantap menjamin bahwa kekuasaan tidak akan digunakan secara sewenang-wenang. Penggunaan kekuasaan harus dilakukan berdasarkan hukum. Penggunaan kekuasaan yang berdasarkan hukum itulah yang diakui keabsahannya.

Saat ini kejahatan semakin hari semakin bertambah, baik itu dari segi kualitas (bentuk pembunuhannya) maupun dari segi kuantitasnya (jumlah pembunuhan). Dari sisi kualitasnya termasuk juga interpretasi dari Pasal 55 KUHP yaitu salah satunya adalah menyuruh melakukan tindak pidana, otak dari si pelaku (*intelectuale dader*) ini yang karena ketidakmampuannya, menghindari pidana atau karena hal lainnya sehingga menyuruh orang lain melakukan tindak pidana salah satunya yaitu pembunuhan.

Menurut **Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009:1)** menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Situasi dan kondisi yang sedemikian rupa inilah, kiranya kejahatan yang terjadi dapat diperhatikan lebih serius lagi baik dari aparat

yang berwenang maupun partisipasi masyarakat, maupun secara operasional didalam penyelesaiannya belumlah memuaskan.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai Tindak Pidana Menyuruh Melakukan Pembunuhan, sehingga penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyuruh Melakukan Pembunuhan Sebagaimana Yang Diatur Dalam KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 548 / PID. B / 2011 / PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dalam putusan perkara nomor 548 / Pid. B / 2011 / PN. Mks ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembunuhan dalam putusan perkara nomor 548 / Pid. B / 2011 / PN. Mks ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui ;

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dalam Putusan Perkara Nomor 548 / Pid. B / 2011 / PN. Mks.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembunuhan dalam Putusan Perkara Nomor 548 / Pid. B / 2011 / PN. Mks.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan yang akhir-akhir ini sering terjadi.
2. Sebagai sumbangan pemikiran / masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam **WvS** / *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, dengan demikian juga **WvS** Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana”, **Adami Chazawi** (2002:67-68) menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu,

ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan perbuatan sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".

Adapun istilah yang dipakai **Moeljatno** dan **Roeslan Saleh** (**Andi Hamzah**, 2008:86) dalam menerjemahkan *Strafbaar feit* adalah istilah perbuatan pidana, dan **Leden Marpaung** (2009:7) menggunakan istilah "delik" **Ter Haar** (**Moeljatno**, 2002:18) memberi definisi untuk delik yaitu tiap-tiap penggangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan penghidupan seseorang atau sekelompok orang. Definisi lain diterangkan bahwa definisi delik adalah perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut (**Yan Pramadya Puspa**, 1977:291).

Menurut **Bambang Waluyo** (2008:6) pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*). **R. Abdoel Djamali** (2005:175) menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkalan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Selanjutnya menurut **Pompe** (**P.A.F. Lamintang**, 1997:182) perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” .

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana (**P.A.F. Lamintang**, 1997:193-194), yaitu:

- a. Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu :
 1. Mencocoki rumusan delik
 2. Melawan hukum
 3. Tidak ada alasan pembenar
- b. Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu :
 1. Adanya kesalahan (terdiri dari **dolus** dan **culpa**)
 2. Dapat dipertanggungjawabkan
 3. Tidak ada alasan pemaaf

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada

perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan biasa merupakan bentuk dasar dari pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampasa nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dinamakan tindak pidana materil yakni tindak pidana yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tertentu (**Leden Marpaung**, 2005:20). Unsur-unsur pasal inipun menjadi dasar bagi unsur-unsur pasal pembunuhan lainnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP adalah :

a. Barang siapa,

yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

b. Dengan sengaja,

yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang menjadi pelaku tindak pidana memiliki kesengajaan.

- c. Merampas nyawa orang lain.

yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah tindakannya tersebut menghilangkan nyawa orang lain / membunuh, sehingga mengakibatkan matinya orang.

C. Bentuk-Bentuk Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Hal ini termuat dalam KUHP bab XIX dengan judul “kejahatan terhadap nyawa” yang diatur dalam pasal 338-350. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahannya. Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam pasal bab XIX KUHP;
 - b. Dilakukan karena kelalAian atau kealpaan yang diatur bab XIX.
 - c. Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, Pasal 351 ayat (3), dan lain-lain.
2. Atas dasar obyeknya (nyawa). Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu:
 - a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344 dan Pasal 345.

- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343.
- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349.

Pembunuhan dapat diartikan menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia (**Leden Marpaung**, 2005:4). Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis. Dan didalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Didalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX diatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang ditempatkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP);
2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP);
3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP);
5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP);
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP);
7. Membujuk / membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP);
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP);
9. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP);
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (Pasal 348 KUHP);

11. Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran matinya kandungan (Pasal 349 KUHP).

D. Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.

Menurut **Adami Chazawi** (2002:71) mengartikan penyertaan sebagai berikut :

“Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana”.

Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi :

- (1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:
 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan.
 2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

- (2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

2. Bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

a. Pelaku (*Dader*)

Perkataan *dader* berasal dari bahasa pokok perkataan yaitu *daad*, yang dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan *hetdoen* atau *hendeling*, yang dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut seorang *dader* dan orang yang melakukan suatu tindakan itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai seorang pelaku.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana atau bahwa sering pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang sering dikatakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai *daders* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka telah turut melakukan suatu tindak pidana.

Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1997:593) telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan antara lain, bahwa :

“Dader (auteur, Thater) vaneen delikt is... hij-en aleen hij-in wien en in wiens doen en laten met de gevolgen daarvan, alle in-en uitwendige bestan-delen aan wezig zijn die in de wettelijke begrips-omse rijving van het delikt ... worden genoend hij dus die alleen en zelt het teit pleegt of begat”.

Berdasarkan definisi di atas yang dimaksud dengan pelaku adalah pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.

Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:594) telah merumuskan pengertian dader sebagai berikut :

“Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-

undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga”.

Berdasarkan rumusan pengertian *dader* di atas, baik yang dibuat oleh Van Hammel maupun oleh Simons, ternyata mempunyai suatu tindak pidana yaitu dengan melihat bagaimana caranya tindak pidana tersebut telah dirumuskan dalam undang-undang ataupun pada sifat dari tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang.

Menurut **Pompe (P.A.F. Lamintang, 1997:295)** :

“Daders moeten wezen alle in art 47 genoemden ... het wordt bevestigd door memorie van toelichting, waaralle in art 47 genoemde personen uitdrukkelijk daders worden genoemd”.

Berdasarkan definisi di atas yang dimaksud dengan *dader* adalah semua orang yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP yang telah dikuatkan oleh penjelasan yang mengatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 KUHP itu adalah pelaku.

Menurut **Langemeijer (P.A.F. Lamintang, 1997:295-296)** :

“Apabila orang mendengar perkataan pelaku, maka menurut pengertiannya yang umum di dalam tata bahasa, teringatlah orang mula-mula pada orang yang secara sendirian telah memenuhi seluruh rumusan delik adalah sudah jelas bahwa

undang-undang tidak pernah mempunyai maksud untuk memandang mereka yang telah menyuruh melakukan atau mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu sebagai pelaku dalam pengertian seperti yang dimaksud yang di atas sebab apabila mereka itu harus juga dipandang sebagai seorang pelaku, maka mereka itu harus pula melaksanakan sendiri tindakan pelaksanaannya”.

b. Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*)

Di dalam suatu *doen plegen* itu, terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana yang biasa disebut sebagai *manus domina* (tangan yang menguasai), dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai).

Di dalam ilmu hukum pengetahuan pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middeliek dader* atau seorang *mittel baretater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material.

Menurut KUHP yang dikemukakan oleh **Adami Chazawi** (2002:85) yang disebut sebagai menyuruh melakukan adalah :

“Dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa

kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu :

- 1) Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya;
- 2) Orang lain itu berbuat :
 - a) Tanpa kesengajaan
 - b) Tanpa kealpaan
 - c) Tanpa tanggung jawab oleh sebab keadaan :
 - (1) Yang tidak diketahuinya
 - (2) Karena disesatkan
 - (3) Karena tunduk pada kekerasan

Penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih diutamakan pada ukuran objektif, yaitu tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang mana dia bertanggungjawab. Walaupun sesungguhnya juga tetap memperhatikan hal-hal yang ternyata subjektif, yaitu dalam hal tidak dipidananya pembuat materilnya (orang yang disuruh melakukan) karena dia berbuat tanpa kesalahan dan dalam hal tidak dipertanggungjawabkan karena keadaan batin orang yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu dan tersesatkan, sesuatu

yang subjektif. Sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan adalah bersifat objektif.

1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan tentang pembuat penyuruh, dialah orang yang menguasai orang lain sebab orang lain itu adalah sebagai alat. Orang inilah yang sesungguhnya mewujudkan tindak pidana. Sedangkan pembuat penyuruhnya tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana.

Mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana tidak secara pribadi tetapi dengan menggunakan orang lain sebagai alat dalam tangannya, mengandung konsekuensi logis, yaitu :

- a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh perbuatan pembuat penyuruh tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*).
- b) Orang lain tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.
- c) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuat penyuruh.

2) Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan

Perbuatan *manus ministra* pada kenyataannya telah mewujudkan tindak pidana namun tidak ada kesalahan di

dalamnya, baik karena kesengajaan maupun kealpaan. Contoh, karena alasan tanpa kesengajaan, seorang pemilik uang palsu (*manus domina*) menyuruh pembantunya berbelanja di pasar dengan menyerahkan sepuluh lembar uang yang diketahuinya palsu. Dalam kejahatan ini, terkandung unsur kesengajaan. Dalam hal ini pembantu itu tidak mengetahui tentang palsunya uang yang dibelanjakannya. Keadaan tidak diketahuinya itu artinya pada dirinya tidak ada unsur kesalahan.

Contoh alasan tanpa kealpaan, seorang ibu membenci seorang pemulung karena seringnya mencuri benda-benda yang diletakkan di pekarangan rumahnya. Pada suatu hari ia mengetahui pemulung yang dibenci itu sedang menarik benda-benda bekas di bawah jendela rumahnya. Untuk membuat penderitaan bagi pemulung itu, dia menyuruh pembantunya untuk menumpahkan air panas dari jendela dan mengenai pemulung tersebut. Pada diri pembantu tidak ada kelalAan apabila telah diketahuinya selama ini bahwa tidaklah mungkin ada dan tidak pernah ada orang yang berada di bawah jendela dan perbuatan seperti itu telah sering pula dilakukannya.

3) Karena tersesatkan

Apa yang dimaksud dengan tersesatkan di sini ialah kekeliruan atau kesalahpahaman akan sesuatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain (*in casu manus*

domina) dengan cara-cara yang isinya tidak benar atau palsu, yang atas kesalahpahaman itu memutuskan kehendak dan berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri. Sehingga apa yang diperbuat oleh orang yang tersesatkan oleh karenanya dipertanggungjawabkan pada orang yang sengaja menyebabkan keadaan tersesatkan itu. Contohnya, ada seorang berkehendak untuk mencuri sebuah tas milik seorang penumpang bus. Sejak semula di terminal, sebelum orang itu naik, bus sedang berhenti pada suatu terminal. Orang jahat tadi itu menyuruh seorang kuli angkut untuk menurunkan tas itu dan membawanya ke sebuah taksi. Pada peristiwa ini, kuli telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain oleh sebab tersesatkan. Di sini telah terjadi pencurian tas tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kuli, melainkan pada orang jahat tersebut sebagai pembuat penyuruh.

4) Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar yang ditujukan pada orang yang mengakibatkan orang itu (fisiknya) tidak berdaya. Dalam hal ini bentuk pembuat penyuruh, kekerasan itu datang dari pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (*manus ministra*) sehingga yang menerima kekerasan fisik ini tidak

mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pembuat penyuruh. Contoh, dua orang hendak merampok, perampok marah karena tuan rumah tidak memberitahu nomor kode pembuka brankas. Perampok itu secara bersama-sama melemparkan tuan rumah itu dari jendela rumah yang bertingkat dan korban menimpa anak kecil yang sedang bermain di bawah dan meninggal. Atas meninggalnya anak ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tuan rumah tetapi pada dua orang yang melemparkannya. Dalam peristiwa ini, tuan rumah adalah murni *manus ministra*, semata-mata alat dalam kekuasaan dua orang yang hendak merampok tadi dan mereka adalah pembuat penyuruh.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan mengenai tidak dapat dipidananya pembuat materiil dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan menurut keterangan yang termuat dalam KUHP, maka dari sudut perbuatan, *manus ministra* dapat dibedakan atas :

1) *Manus ministra* yang berbuat positif

Pada sebab tidak dipidananya *manus minustra* atas dasar tanpa kesalahan (baik kesengajaan maupun kealpaan), tersesatkan, sesuatu sebab dari sikap batinnya sendiri (subjekti). Di sini tindak pidana dapat terwujud adalah atas perbuatannya sepenuhnya.

2) *Manus ministra* yang tidak berbuat apapun

Pada sebab tidak dipidanya *manus ministra*, pembuat materiilnya atas dasar kekerasan, sesuatu yang dapat menyebabkan ketidakberdayaan fisik absolute. Di sini *manus ministra* sebagai alat, laksana tongkat untuk memukul orang.

VOS (Adami Chazawi, 2002:91) menyatakan bahwa tidak dipidanya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh melakukan disebabkan karena :

- 1) Orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*) adalah tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 44 KUHP.
- 2) Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa (*over macht*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP.
- 3) *Manus ministra* melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

- 4) Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.
- 5) *Manus ministra* dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang.

Utrecht (Adami Chazawi, 2002:93) berbeda cara dalam melihat sebab mengapa pembuat penyuruh tidak dapat dipidana, yaitu:

“*Manus ministra* itu sebenarnya tidaklah melakukan tindak pidana, atau perbuatan apa yang diperbuatnya tidaklah dapat dikualifisir sebagai tindak pidana. *Manus ministra* dalam berbuat yang pada kenyataannya tindak pidana, oleh sebab beberapa alasan yang menghapus kesalahan pada diri pembuat materiilnya.”

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diberikan contoh yaitu seorang pembantu rumah tangga yang diperintah oleh majikannya untuk memberikan minuman kepada seorang tamunya, dimana majikan tersebut bermaksud membunuh si tamu. Majikan tahu betul bahwa minuman itu akan segera mematikan tamu yang dituju. Pembantu yang tidak mengetahui maksud majikannya yang sebenarnya dan tidak tahu pula bahwa minuman itu dapat mematikan si tamu dan karena tunduk pada perintah majikannya, dia memberikan minuman itu, dan matilah si tamu. Dari contoh tersebut, apa yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga tidak dapat dikualifisir sebagai pembunuhan. Unsur kesengajaan yang ditujukan pada akibat kematian si tamu tidak ada, padahal unsur ini

adalah unsur yang tidak dapat dihilangkan dari kejahatan pembunuhan.

Alasan penghapus kesalahan yang dimaksud ialah alasan peniadaan pidana yang berasal dari batin si pembuat. Perbuatan si pembuat pada kenyataannya atau wujudnya adalah tindak pidana, tetapi tidak terdapat unsur kesalahan pada diri si pembuat.

c. Turut Melakukan (*Mede Plegen*)

Menurut KUHP (**Adami Chazawi**, 2002:96) yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Seperti, dua orang A dan B mencuri sebuah televisi di sebuah rumah, di mana mereka berdua sama-sama masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan sama-sama pula mengangkat televisi tersebut ke dalam mobil yang berada di pinggir jalan. Pada contoh ini, perbuatan A dan B sama-sama mengangkat televisi jelas perbuatan mereka telah sama-sama memenuhi rumusan tindak pidana.

Menurut Van Hamel (**P.A.F. Lamintang**, 1997:617)

mengatakan bahwa :

“Suatu *medeplegen* itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu *daderschap* secara sempurna.”

Hoge Raad dalam *arrestnya* (**Adami Chazawi**, 2002:99)

telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu: “yang pertama antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi dan yang kedua yaitu para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan”. Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh *Roge Raad* di atas, maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu :

- 1) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana.
- 2) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Di sini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana.

Kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Di dalam keinsyafan kerjasama ini

terdapat kehendak yang sama kuat yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembuat peserta mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana. Kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap perbuatan yang lainnya ketika berlangsungnya pelaksanaan.

Mengenai mereka bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana terkandung makna bahwa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidak perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan yang dilakukan pembuat pelaksana dalam mewujudkan tindak pidana.

d. Membujuk atau Menggerakkan (*Uitlokker*)

Van Hamel telah merumuskan *uitlokking* itu sebagai suatu bentuk *deelneming* atau keturutsertaan (P.A.F. Lamintang, 1997:634) berupa :

“Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan”.

Rumusan Pasal 55 ayat (2) ke-2 menyebutkan secara lengkap tentang bentuk orang yang sengaja menganjurkan sebagai berikut :

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

e. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Mengenai hal pembantuan diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 56, 57, dan 60. Pasal 56 merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif pembantuan serta bentuk pembantuan. Sedangkan pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu. Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan dan tidak dalam hal pelanggaran.

Berdasarkan rumusan Pasal 56 KUHP, ada dua bentuk pembantuan, yaitu :

(1) Pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan

Pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan, oleh undang-undang telah diberikan pembatasan-pembatasan mengenai cara melakukannya, yaitu :

- a) dengan memberikan kesempatan
- b) dengan memberikan sarana
- c) dengan memberikan keterangan

Ketiga cara tersebut di atas terdapat juga pada bentuk pengancuran. Perbedaan antara ketiga cara tersebut pada pengancuran dengan pada pembantuan adalah dalam hal fungsinya. Dalam pengancuran fungsi atau andil dari penggunaan tiga upaya pengancuran itu adalah membentuk kehendak orang lain untuk melakukan tindak pidana selalu berasal dari pembuat pengancurnya. Selain itu upaya yang digunakan itu berfungsi untuk membentuk kehendak orang atau pembuat pelaksananya untuk melakukan tindak pidana.

Sedangkan pada bentuk pembantuan, ketiga cara pembantuan tersebut di atas tidak berfungsi membentuk kehendak orang yang dibantu untuk melaksanakan kejahatan. Karena pada setiap bentuk pembantuan, kehendak untuk melakukan kejahatan pada pembuat pelaksananya telah terbentuk lebih dulu sebelum pembuat pembantu menyampaikan atau menggunakan tiga upaya pembantuan tersebut. Dalam bentuk pembantuan, kesengajaan pembuat pembantu dalam menggunakan tiga cara tersebut tidak ditujukan pada pembentukan kehendak orang yang dibantunya (pembuat pelaksananya) tetapi ditujukan untuk sekedar mempermudah atau memperlancar bagi pembuat pelaksana dalam hal melaksanakan kejahatan. Kehendak pembuat

pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana tidak ada hubungan dengan kehendak atau kesengajaan pembuat pembantu.

Contoh pertama, pembantuan dengan memberikan keterangan. A kecewa pada B karena B melaporkannya ke polisi yang mengakibatkan A dipidana penjara. Untuk melampiaskan kekecewaannya itu, A memutuskan untuk membunuh B setelah keluar dari penjara. Setelah selesai menjalani pidana, A mencari B namun tidak berhasil. Maka A dating menemui temannya yaitu C untuk menanyakan tentang keberadaan B dan menerangkan tentang kehendaknya membunuh B. Kebetulan C juga sakit hati pada B karena B pernah menipunya. Untuk menolong A, maka C memberikan keterangan tentang keberadaan atau tempat tinggal B. Atas keterangan C, A berhasil menemukan B kemudian membunuhnya.

Contoh kedua, pembantuan dengan memberikan sarana. B memberikan sebuah samurai pada A yang diketahuinya bahwa A hendak membunuh C. Dengan samurai itu, A melaksanakan pembunuhan terhadap si C.

Contoh ketiga, pembantuan dengan memberikan kesempatan. A seorang supir taksi, dia sengaja menghentikan mobilnya di tempat yang sepi dengan berpura-pura mogok dengan maksud menolong temannya B yang diketahuinya sejak

lama telah menguntit C untuk merampok uang yang dibawa penumpangnya itu.

(2) Pembantuan pada saat kejahatan dilaksanakan

Pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan kadang sukar membedakannya dengan bentuk pembuat peserta atau orang turut serta melakukan tindak pidana (Pasal 55 ayat (1) butir 1). Pembedaan ini menjadi sangat penting berhubung dengan dua hal, yaitu :

- a) Pidana pada orang turut serta adalah sama dengan pembuat tunggal (*dader*) sedangkan pada orang yang membantu tidak sama dengan pembuat tunggal atau juga tidak sama dengan bentuk-bentuk peserta lainnya karena pidana terhadap pembantuan setinggi-tingginya pidana pokok dikurangi sepertiganya (Pasal 57 ayat 1).
- b) Turut serta pada pelanggaran dipidana, sedangkan pembantuan pelanggaran tidak dipidana.

Dalam KUHP, *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, dan *uitlokker* dibebani tanggung jawab yang sama antara mereka, yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya, sedangkan bagi orang yang terlibat sebagai pembuat pembantu, baik pembantuan pada pelaksanaan kejahatan

maupun pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan (Pasal 56 KUHP) dibebani tanggung jawab yang lebih ringan dari orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP yaitu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga (Pasal 57 ayat (1) KUHP).

Pasal 58 KUHP mengatur bahwa :

“Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pembantu saja”.

Namun dalam kenyataannya banyak para ahli yang menerima bahwa hal alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan (**Sudarto**, 1990:138). Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan / tingkah laku (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidananya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidananya perbuatan / tindakan (**Jan Remmelink**, 2003:203).

Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar (**Satochid Kartanegara**, 1999:441-442). Perbuatan yang pada umumnya dipandang

sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatutnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatutnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan pemaaf (**Roeslan Saleh**, 1983:126).

E. Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana yang dimaksud disini adalah hukuman, menurut **R. Soesilo** (1995:35) yang dimaksud dengan hukuman ialah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”. Pengertian lain diberikan oleh **Emanuel Kant** (**R. Soesilo**, 1995:35) yang mendefinisikan hukuman atau pidana adalah suatu pembalasan, definisi ini didasarkan atas pepatah kuno yang mengatakan “Siapa membunuh harus dibunuh”, namun ada juga yang mengartikan pidana sebagai media untuk menakut-nakuti orang supaya orang tersebut tidak melakukan kejahatan (tindak Pidana).

Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan (**Soerdjono Soekanto**,

1983:1), perangkat tersebut yang dimaksud adalah norma, kaidah, atau aturan.

2. Jenis-Jenis Pidana

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke 2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Reglemen Penjara (stb 1917 NO. 708) yang telah diubah dengan (LN 1948 No. 77);
- 2) Ordonasi pelepasan bersyarat (stb 1917 No. 749);
- 3) Reglemen pendidikan paksaan (stb 1917 No. 741);
- 4) UU No. 20 tahun 1946 tentang pidana tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pidana pengumuman keputusan hakim

Jenis-Jenis pidana pokok

1) Pidana Mati

Berdasarkan Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat karena pidana ini adalah pidana yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra bergantung pada kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara
(Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129 KUHP)
- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya
: Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP

- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan unsur atau faktor yang sangat memberiatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2) KUHP)
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444 KUHP)

2) Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka ke dua jenis pidana itu tampaknya sama.

Stelsel pidana penjara, menurut Pasal 12 ayat, dibedakan menjadi (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni :

- 1) Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2) KUHP, dan
- 2) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara

sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya : Pasal 106, Pasal 108 ayat (2) KUHP.

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHP). Pidana penjara sementara waktu dapat atau mungkin dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP.

3) Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

- a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus.
- c. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan atau bekerja pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara
- d. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP)
- e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan

hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan atau dieksekusi.

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang yang dipasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh : hakim bisa saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362

pencurian sebuah mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang dimaksudkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Dalam praktik hukum selama ini, hampir hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.

Jenis-Jenis Pidana Tambahan

1) Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgelijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang melalui alat atau lembaganya melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersebjata/TNI
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri

f. Hak menjalankan mata pencaharian

Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Pasal 38 menentukan tentang lamanya waktu bila hakim menjatuhkan juga pidana pencabutan hak-hak tertentu.

- a. Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur hidup
- b. Jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu maksimum lima tahun dan minimum dua tahun lebih lama dari pada pidana pokoknya
- c. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa pidana denda, maka pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal-pasal : 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375.

- a) Hak menjalankan jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata atau TNI
- c) Pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d) Hak menjadi penasihat hukum (*raadsman*) atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang bukan anak sendiri, dan hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan pencaharian.

2) Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39), yaitu:

- a. Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari

kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat

- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya terdapat dalam Pasal-Pasal 128, 206, 361, 377, 395, 405. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut bisa dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian itu, adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

3. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan dijatuhkan pemidanaan pada masa *ancient regime* berlandaskan pada tujuan retributif, yaitu menjadikan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan. Pembalasan ini dirasakan adil sebagai tujuan pemidanaan karena kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat sehingga pelaku kejahatan sangat pantas mendapat pembalasan yang setimpal (**J.M. van Bemmelen**, 1987:25).

Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada tiga kelompok teori pemidanaan, yaitu : (1) teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorie*); (2) teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltheorie*); dan (3) teori gabungan (*verenigings theorie*):

1) Teori Absolut

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quai peccatum est*). pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Misalnya, jika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal dengan perbuatannya adalah dengan dijatuhi pidana mati.

Menurut **Johannes Andenaes** (**Antonius Sudirman**, 2009:107) tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah sekunder.”

Menurut **Emmanuel Kant** (**Antonius Sudirman**, 2009:108):

“Pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pemidanaan sebagai *kategorische imperative*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Jadi pidana bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).”

2) Teori Relatif

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Dengan kata lain pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau peng-imbalan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan

masyarakat (*social defence*). Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quai peccatum est*) melainkan “supaya orang jangan melakukan kejahatan” (*ne peccetur*).

Hal ini sesuai dengan pernyataan Seneca (**Antonius Sudirman**, 2009:109) seorang filsuf Romawi yang menegaskan:

“Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur (yang berarti: No reasonable man punished because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong-doing). Artinya, tidak seseorang normal pun dipidana karena telah melakukan perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat lagi.”

Jadi pidana itu diberikan/untuk mencegah timbulnya kejahatan, sehingga tampak sifat pidana, yaitu untuk :

- a. Menakut-nakuti orang agar orang takut melakukan kejahatan. Dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.
- b. Memperbaiki perilaku si terpidana agar tidak mengulangi kejahatan.

Jika ada orang yang tidak takut lagi dengan adanya sanksi pidana dalam undang-undang sehingga melakukan tindak pidana (kejahatan), tetapi yang bersangkutan masih mungkin untuk diperbaiki lagi perilakunya, maka pidana yang dijatuhkan padanya harus bersifat mendidik agar tidak mengulangi tindak pidana.

- c. Membinasakan, apabila yang bersangkutan tidak bisa diperbaiki lagi.

Apabila ada tabiat atau perilaku dari pelaku kejahatan tidak dapat diperbaiki lagi, maka orang seperti ini harus dibinasakan atau dicabut hak hidupnya melalui penjatuhan pidana mati.

3) Teori Gabungan

Pada Dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas (**Leden Marpaung**, 2009:107). Menurut teori gabungan (*verenigings-theorien*), tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana disamping sebagai pembalasan juga diakui bahwa pidana memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun masyarakat. Penulis pertama yang mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1884). Teorinya disebut sebagai teori gabungan karena pemidanaan menurut Rossi, yakni selain sebagai upaya pembalasan juga mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi generale*.

Andi Hamzah (Antonius Sudirman, 2009:110) menegaskan bahwa secara garis besar teori gabungan dapat dibedakan atas tiga golongan sebagai berikut :

- a. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pembalasan.

Menurut teori ini bahwa pembalasan tetap ada (atau mutlak), tetapi diterapkan dengan kepentingan masyarakat.

- b. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata tertib masyarakat.

Menurut teori gabungan ini bahwa pidana tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan kegunaannya juga tidak boleh lebih berat dari pada yang seharusnya.

- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Teori ini dikembangkan oleh J.E. Sahetapy, Menurut **Sahetapy**

(**Antonius Sudirman**, 2009:111):

“Pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik, sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami perubahan, kecuali ruang geraknya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang geraknya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual.”

F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak

hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Namun hal yang perlu diingat adalah Hakim tidak mempunyai kekuasaan untuk menginterpretasikan undang-undang karena mereka bukan pembuat undang-undang, sehingga hakim hanya boleh menjalankan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang (**J.M. van Bemmelen**, 1991:1-2).

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas pertimbangan, pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap para terdakwa, seorang hakim haruslah memutuskan sebuah putusan dengan pertimbangan yang berasal dari hati nuraninya lalu kemudian ke pikirannya agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembelaan dari seorang terdakwa;

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Alat bukti yang terbukti di persidangan;
4. Unsur-Unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum;
5. Ada tidaknya alasan penghapus pidana;
6. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;
7. Hal-hal yang memberitakan bagi terdakwa; serta
8. Alasan Sosiologis dari terdakwa.

Dari beberapa hal diatas yang dapat dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan, selain itu perbuatan yang melawan hukum menurut hukum pidana (**Andi Zainal Abidin**, 1983:48), dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana (**Moeljatno**, 1983:23-24).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar khususnya di Instansi Pengadilan Negeri Makassar. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor Pengadilan Negeri Makassar tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen perkara yang meliputi berita acara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang.

B. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, peneliti turun langsung ke lapangan (Pengadilan Negeri Makassar) untuk mengumpulkan data dengan cara :

1. Wawancara, untuk menjangkit data-data yang terkait dengan perumusan delik penyertaan dan alasan yang memberitakan pidana, maka dilakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara ini.
2. Studi Dokumentasi, mempelajari berkas perkara seperti berita acara penuntutan, penyitaan dan Putusan Hakim.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi skripsi ini maka penulis menyusun bab-bab yang terdiri dari lima bab, yang mana hubungan antara bab saling terkait dan merupakan satu kesatuan.

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Bab satu adalah pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

2. Bab dua adalah tinjauan pustaka, yang memuat : Tinjauan umum terhadap tindak pidana, tinjauan umum terhadap tindak pidana pembunuhan, bentuk-bentuk pembunuhan, bentuk-bentuk penyertaan, serta pidana dan pembedaan.
3. Bab tiga adalah metode penelitian yang memuat tentang : lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.
4. Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang : penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dalam putusan perkara nomor 548 / Pid.B / 2011 / PN.Mks. dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembunuhan dalam putusan perkara nomor 548 / Pid.B / 2011 / PN.Mks.
5. Bab lima adalah penutup yang memuat tentang : kesimpulan dan saran.
6. Daftar pustaka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Dalam Putusan Perkara Nomor 548 / Pid.B / 2011 / PN.Mks.

1. Posisi Kasus

Aladin Baso Tomo alias Alan (Terdakwa 1) dan Nahria Abu Noni alias Yanti (Terdakwa 2) serta bersama Samsuddin alias Cimeng, Budy Prasetyo, Aris Dyanto, Handoko, dan Sigit Wahyudi (yang kesemuanya di sidang pada persidangan tersendiri yaitu di Mahkamah Militer) pada hari Selasa Tanggal 4 Januari 2011 sekitar Pukul 03:00 WITA atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan tersebut berawal pada tanggal 31 Desember 2010 menjelang tahun baru (pergantian tahun 2010 ke tahun 2011), rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti (isteri dari Aladin Baso Tomo alias Alan) dirusak oleh kurang lebih 8 (delapan) orang, diantaranya Moha, Ashari, Bagong, dan Pudding. Mereka merusak rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti dengan cara melemparkan batu ke jendela rumah kos hingga pecah, dan motor

yang terparkir di rumah kos juga dirusak dengan cara di tebas dan dihantam dengan benda keras berupa balok kayu dan masuk ke rumah kos dan mengambil barang-barang berupa pakaian, karena dipicu hal tersebut Aladin Baso Tomo alias Alan dendam dan menghubungi rekannya Samsuddin alias Cimeng (selaku anggota TNI AD Batalyon Kaveleri 10 Serbu) meminta tolong membalaskan dendamnya dengan cara memberi pelajaran kepada para pelaku yang telah merusak rumah kos milik isterinya, dan kemudian Samsuddin alias Cimeng menyanggupinya dengan mengatakan bahwa “tenangmeki nanti saya bawa anggota”.

Pada 4 Januari 2011 Pukul 02:00 WITA Samsuddin alias Cimeng menghubungi Aladin Baso Tomo alias Alan melalui telepon genggam untuk menemuinya di Jalan Faisal, saat pertemuan Samsuddin alias Cimeng dan kedelapan temannya meminta kepada Aladin Baso Tomo alias Alan untuk menunjukkan tempat tinggal pelaku pengrusakan rumah kos milik isterinya tersebut. Selanjutnya Aladin Baso Tomo alias Alan bersama Samsuddin alias Cimeng dan kedelapan temannya sebelum ke TKP (tempat kejadian perkara) membeli satu botol Aqua besar berisi bensin, dengan mengendarai motor Aladin Baso Tomo alias Alan yang berboncengan dengan isterinya (Nahria Abu Noni alias Yanti) dan bersama Samsuddin alias Cimeng serta kedelapan temannya sampai di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Kota Makassar,

kemudian menyiramkan bensin ke sebuah becak terparkir di Lorong VII tersebut lalu dibakar, tak hanya itu Samsuddin alias Cimeng serta kedelapan temannya juga menyiramkan bensin kerumah para pelaku pengrusakan rumah kos milik isteri Aladin Baso Tomo alias Alan.

Pada saat kejadian Samsuddin alias Cimeng melihat Aladin Baso Tomo alias Alan memegang sebilah parang sedangkan Aris Dyanto (teman dari Samsuddin alias Cimeng) memegang sangkur, lalu Aladin Baso Tomo alias Alan memarangi kepala korban Sangir Efendi dan hanya mengenai telinga korban hingga putus, dan Aris Dyanto menusuk bagian pusat korban hingga bersimbah darah, kemudian warga berdatangan dan membawa korban Sangir Efendi ke Rumah Sakit, namun beberapa saat setelah di rumah sakit korban Sangir Efendi meninggal dunia.

Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor 01/RSSIF/I/OS tanggal 4 Januari 2011 menerangkan bahwa korban Sangir Efendi meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan tampak luka iris ukuran 4 cm memanjang sampai belakang telinga, dan tampak luka tusuk ukuran 2,5 cm, tepi sudut lancip, dasar luka tembus (tampak bagian usus keluar), pendarahan aktif dan keluar sisa makanan, kesimpulan disebabkan oleh benda tajam yang menikam dan korban meninggal (berdasarkan hasil pemeriksaan dari dr. Abdul Rahman pada Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar).

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa Aladin Baso Tomo alias Alan (Terdakwa 1) dan Nahria Abu Noni alias Yanti (Terdakwa 2) yang dibacakan pada persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya mendakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

“Aladin Baso Tomo alias Alan (Terdakwa 1) dan Nahria Abu Noni alias Yanti (Terdakwa 2) serta bersama Samsuddin alias Cimeng, Budy Prasetyo, Aris Dyanto, Handoko, dan Sigit Wahyudi (yang kesemuanya di sidang pada persidangan tersendiri yaitu di Mahkamah Militer) pada hari Selasa Tanggal 4 Januari 2011 sekitar Pukul 03:00 WITA atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dimana Aladin Baso Tomo alias Alan dan Nahria Abu Noni alias Yanti (yang keduanya adalah suami isteri) menyuruh melakukan pembunuhan”.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pembunuhan tersebut berawal pada tanggal 31 Desember 2010 menjelang tahun baru (pergantian tahun 2010 ke tahun 2011), rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti (isteri dari Aladin Baso Tomo alias Alan) dirusak oleh kurang lebih 8 (delapan) orang, diantaranya Moha, Ashari, Bagong, dan Pudding. Mereka merusak rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti dengan cara melemparkan batu ke jendela rumah kos hingga pecah, dan motor yang terparkir di rumah kos juga dirusak dengan cara di tebas dan dihantam dengan benda keras berupa balok kayu dan masuk ke rumah kos dan mengambil barang-barang berupa pakaian, karena dipicu hal tersebut Aladin Baso Tomo alias Alan dendam dan menghubungi rekannya Samsuddin alias Cimeng (selaku anggota

TNI AD Batalyon Kaveleri 10 Serbu) meminta tolong membalaskan dendamnya dengan cara memberi pelajaran kepada para pelaku yang telah merusak rumah kos milik isterinya, dan kemudian Samsuddin alias Cimeng menyanggupinya dengan mengatakan bahwa “tenangmeki nanti saya bawa anggota”.

Pada 4 Januari 2011 Pukul 02:00 WITA Samsuddin alias Cimeng menghubungi Aladin Baso Tomo alias Alan melalui telepon genggam untuk menemuinya di Jalan Faisal, saat pertemuan Samsuddin alias Cimeng dan kedelapan temannya meminta kepada Aladin Baso Tomo alias Alan untuk menunjukkan tempat tinggal pelaku pengrusakan rumah kos milik isterinya tersebut. Selanjutnya Aladin Baso Tomo alias Alan bersama Samsuddin alias Cimeng dan kedelapan temannya sebelum ke TKP (tempat kejadian perkara) membeli satu botol Aqua besar berisi bensin, dengan mengendarai motor Aladin Baso Tomo alias Alan yang berboncengan dengan isterinya (Nahria Abu Noni alias Yanti) dan bersama Samsuddin alias Cimeng serta kedelapan temannya sampai di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Kota Makassar, kemudian menyiramkan bensin ke sebuah becak terparkir di Lorong VII tersebut lalu dibakar, tak hanya itu Samsuddin alias Cimeng serta kedelapan temannya juga menyiramkan bensin kerumah para pelaku pengrusakan rumah kos milik isteri Aladin Baso Tomo alias Alan.

Pada saat kejadian Samsuddin alias Cimeng melihat Aladin Baso Tomo alias Alan memegang sebilah parang sedangkan Aris Dyanto (teman dari Samsuddin alias Cimeng) memegang sangkur, lalu Aladin Baso Tomo alias Alan memarangi kepala korban Sangir Efendi dan hanya mengenai telinga korban hingga putus, dan Aris Dyanto menusuk bagian pusat korban hingga bersimbah darah, kemudian warga berdatangan dan membawa korban Sangir Efendi ke Rumah Sakit, namun beberapa saat setelah di rumah sakit korban Sangir Efendi meninggal dunia.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Dakwaan Subsidiar :

“Aladin Baso Tomo alias Alan (Terdakwa 1) dan Nahria Abu Noni alias Yanti (Terdakwa 2) serta bersama Samsuddin alias Cimeng, Budy Prasetyo, Aris Dyanto, Handoko, dan Sigit Wahyudi (yang kesemuanya di sidang pada persidangan tersendiri yaitu di Mahkamah Militer) pada hari Selasa Tanggal 4 Januari 2011 sekitar

Pukul 03:00 WITA atau setidak-tidaknya waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Kota Makassar, atau setidak-tidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan merampas nyawa orang lain, dimana Aladin Baso Tomo alias Alan dan Nahria Abu Noni alias Yanti (yang keduanya adalah suami isteri) menyuruh melakukan pembunuhan”.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pembunuhan tersebut berawal pada tanggal 31 Desember 2010 menjelang tahun baru (pergantian tahun 2010 ke tahun 2011), rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti (isteri dari Aladin Baso Tomo alias Alan) dirusak oleh kurang lebih 8 (delapan) orang, diantaranya Moha, Ashari, Bagong, dan Pudding. Mereka merusak rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti dengan cara melemparkan batu ke jendela rumah kos hingga pecah, dan motor yang terparkir di rumah kos juga dirusak dengan cara di tebas dan dihantam dengan benda keras berupa balok kayu dan masuk ke rumah kos dan mengambil barang-barang berupa pakaian, karena dipicu hal tersebut Aladin Baso Tomo alias Alan dendam dan menghubungi rekannya Samsuddin alias Cimeng (selaku anggota TNI AD Batalyon Kaveleri 10 Serbu) meminta tolong membalaskan dendamnya dengan cara memberi pelajaran kepada para pelaku yang telah merusak rumah kos milik isterinya, dan kemudian Samsuddin alias Cimeng menyanggupinya dengan mengatakan bahwa “tenangmeki nanti saya bawa anggota”.

Pada 4 Januari 2011 Pukul 02:00 WITA Samsuddin alias Cimeng menghubungi Aladin Baso Tomo alias Alan melalui telepon genggam untuk menemuinya di Jalan Faisal, saat pertemuan Samsuddin alias Cimeng dan kedelapan temannya meminta kepada Aladin Baso Tomo alias Alan untuk menunjukkan tempat tinggal pelaku pengrusakan rumah kos milik isterinya tersebut. Selanjutnya Aladin Baso Tomo alias Alan bersama Samsuddin alias Cimeng dan kedelapan temannya sebelum ke TKP (tempat kejadian perkara) membeli satu botol Aqua besar berisi bensin, dengan mengendarai motor Aladin Baso Tomo alias Alan yang berboncengan dengan isterinya (Nahria Abu Noni alias Yanti) dan bersama Samsuddin alias Cimeng serta kedelapan temannya sampai di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Kota Makassar, kemudian menyiramkan bensin ke sebuah becak terparkir di Lorong VII tersebut lalu dibakar, tak hanya itu Samsuddin alias Cimeng serta kedelapan temannya juga menyiramkan bensin

kerumah para pelaku pengrusakan rumah kos milik isteri Aladin Baso Tomo alias Alan.

Pada saat kejadian Samsuddin alias Cimeng melihat Aladin Baso Tomo alias Alan memegang sebilah parang sedangkan Aris Dyanto (teman dari Samsuddin alias Cimeng) memegang sangkur, lalu Aladin Baso Tomo alias Alan memarangi kepala korban Sangir Efendi dan hanya mengenai telinga korban hingga putus, dan Aris Dyanto menusuk bagian pusat korban hingga bersimbah darah, kemudian warga berdatangan dan membawa korban Sangir Efendi ke Rumah Sakit, namun beberapa saat setelah di rumah sakit korban Sangir Efendi meninggal dunia.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Dakwaan Lebih Subsidair :

“Aladin Baso Tomo alias Alan (Terdakwa 1) dan Nahria Abu Noni alias Yanti (Terdakwa 2) serta bersama Samsuddin alias Cimeng, Budy Prasetyo, Aris Dyanto, Handoko, dan Sigit Wahyudi (yang kesemuanya di sidang pada persidangan tersendiri yaitu di Mahkamah Militer) pada hari Selasa Tanggal 4 Januari 2011 sekitar Pukul 03:00 WITA atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dimana Aladin Baso Tomo alias Alan dan Nahria Abu Noni alias Yanti (yang keduanya adalah suami isteri) turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang”.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pembunuhan tersebut berawal pada tanggal 31 Desember 2010 menjelang tahun baru (pergantian tahun 2010 ke tahun 2011), rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti (isteri dari Aladin Baso Tomo alias Alan) dirusak oleh kurang lebih 8 (delapan) orang, diantaranya Moha, Ashari, Bagong, dan Pudding. Mereka merusak rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti dengan cara melemparkan batu ke jendela rumah kos hingga pecah, dan motor yang terparkir di rumah kos juga dirusak dengan cara di tebas dan dihantam dengan benda keras berupa balok kayu dan masuk ke rumah kos dan mengambil barang-barang berupa pakaian, karena

dipicu hal tersebut Aladin Baso Tomo alias Alan dendam dan menghubungi rekannya Samsuddin alias Cimeng (selaku anggota TNI AD Batalyon Kaveleri 10 Serbu) meminta tolong membalaskan dendamnya dengan cara memberi pelajaran kepada para pelaku yang telah merusak rumah kos milik isterinya, dan kemudian Samsuddin alias Cimeng menyanggupinya dengan mengatakan bahwa “tenangmeki nanti saya bawa anggota”.

Pada 4 Januari 2011 Pukul 02:00 WITA Samsuddin alias Cimeng menghubungi Aladin Baso Tomo alias Alan melalui telepon genggam untuk menemuinya di Jalan Faisal, saat pertemuan Samsuddin alias Cimeng dan kedelapan temannya meminta kepada Aladin Baso Tomo alias Alan untuk menunjukkan tempat tinggal pelaku pengrusakan rumah kos milik isterinya tersebut. Selanjutnya Aladin Baso Tomo alias Alan bersama Samsuddin alias Cimeng dan kedelapan temannya sebelum ke TKP (tempat kejadian perkara) membeli satu botol Aqua besar berisi bensin, dengan mengendarai motor Aladin Baso Tomo alias Alan yang berboncengan dengan isterinya (Nahria Abu Noni alias Yanti) dan bersama Samsuddin alias Cimeng serta kedelapan temannya sampai di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Kota Makassar, kemudian menyiramkan bensin ke sebuah becak terparkir di Lorong VII tersebut lalu dibakar, tak hanya itu Samsuddin alias Cimeng serta kedelapan temannya juga menyiramkan bensin kerumah para pelaku pengrusakan rumah kos milik isteri Aladin Baso Tomo alias Alan.

Pada saat kejadian Samsuddin alias Cimeng melihat Aladin Baso Tomo alias Alan memegang sebilah parang sedangkan Aris Dyanto (teman dari Samsuddin alias Cimeng) memegang sangkur, lalu Aladin Baso Tomo alias Alan memarangi kepala korban Sangir Efendi dan hanya mengenai telinga korban hingga putus, dan Aris Dyanto menusuk bagian pusat korban hingga bersimbah darah, kemudian warga berdatangan dan membawa korban Sangir Efendi ke Rumah Sakit, namun beberapa saat setelah di rumah sakit korban Sangir Efendi meninggal dunia.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Atau

“Aladin Baso Tomo alias Alan (Terdakwa 1) dan Nahria Abu Noni alias Yanti (Terdakwa 2) serta bersama Samsuddin alias Cimeng, Budy Prasetyo, Aris Dyanto, Handoko, dan Sigit Wahyudi (yang

kesemuanya di sidang pada persidangan tersendiri yaitu di Mahkamah Militer) pada hari Selasa Tanggal 4 Januari 2011 sekitar Pukul 03:00 WITA atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan melakukan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dimana Aladin Baso Tomo alias Alan dan Nahria Abu Noni alias Yanti (yang keduanya adalah suami isteri) turut serta melakukan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang”.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pembunuhan tersebut berawal pada tanggal 31 Desember 2010 menjelang tahun baru (pergantian tahun 2010 ke tahun 2011), rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti (isteri dari Aladin Baso Tomo alias Alan) dirusak oleh kurang lebih 8 (delapan) orang, diantaranya Moha, Ashari, Bagong, dan Pudding. Mereka merusak rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti dengan cara melemparkan batu ke jendela rumah kos hingga pecah, dan motor yang terparkir di rumah kos juga dirusak dengan cara di tebas dan dihantam dengan benda keras berupa balok kayu dan masuk ke rumah kos dan mengambil barang-barang berupa pakaian, karena dipicu hal tersebut Aladin Baso Tomo alias Alan dendam dan menghubungi rekannya Samsuddin alias Cimeng (selaku anggota TNI AD Batalyon Kaveleri 10 Serbu) meminta tolong membalaskan dendamnya dengan cara memberi pelajaran kepada para pelaku yang telah merusak rumah kos milik isterinya, dan kemudian Samsuddin alias Cimeng menyanggupinya dengan mengatakan bahwa “tenangmeki nanti saya bawa anggota”.

Pada 4 Januari 2011 Pukul 02:00 WITA Samsuddin alias Cimeng menghubungi Aladin Baso Tomo alias Alan melalui telepon genggam untuk menemuinya di Jalan Faisal, saat pertemuan Samsuddin alias Cimeng dan kedelapan temannya meminta kepada Aladin Baso Tomo alias Alan untuk menunjukkan tempat tinggal pelaku pengrusakan rumah kos milik isterinya tersebut. Selanjutnya Aladin Baso Tomo alias Alan bersama Samsuddin alias Cimeng dan kedelapan temannya sebelum ke TKP (tempat kejadian perkara) membeli satu botol Aqua besar berisi bensin, dengan mengendarai motor Aladin Baso Tomo alias Alan yang berboncengan dengan isterinya (Nahria Abu Noni alias Yanti) dan bersama Samsuddin alias Cimeng serta kedelapan temannya sampai di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Kota Makassar, kemudian menyiramkan bensin ke sebuah becak terparkir di

Lorong VII tersebut lalu dibakar, tak hanya itu Samsuddin alias Cimeng serta kedelapan temannya juga menyiramkan bensin kerumah para pelaku pengrusakan rumah kos milik isteri Aladin Baso Tomo alias Alan.

Pada saat kejadian Samsuddin alias Cimeng melihat Aladin Baso Tomo alias Alan memegang sebilah parang sedangkan Aris Dyanto (teman dari Samsuddin alias Cimeng) memegang sangkur, lalu Aladin Baso Tomo alias Alan memarangi kepala korban Sangir Efendi dan hanya mengenai telinga korban hingga putus, dan Aris Dyanto menusuk bagian pusat korban hingga bersimbah darah, kemudian warga berdatangan dan membawa korban Sangir Efendi ke Rumah Sakit, namun beberapa saat setelah di rumah sakit korban Sangir Efendi meninggal dunia.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP**;

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa :

1. Alat bukti keterangan saksi-saksi (saksi Agus Salim

Daeng Ngerang alias Agus, saksi Daeng Lia, saksi

Daeng Lumu, saksi Daeng Taha, dan saksi Nur Afia),

yang diuraikan sebagai berikut :

Saksi Agus Salim Daeng Ngerang alias Agus menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pembunuhan terhadap korban Sangir Efendi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2011 sekitar jam 03:00 WITA di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII, Nomor 4 Kota Makassar;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan korban, malam itu saksi dan isteri saksi terbangun karena mendengar teriakan korban “tidakji-tidakji”, setelah membuka pintu saksi melihat korban berdiri di pintu sambil memegang perutnya;
- Bahwa ketika itu korban mengatakan “tolongka dulu bawa ke rumah sakit karena saya luka”, selanjutnya saksi menolong korban membawa ke Rumah Sakit Faisal dengan becak;

- Bahwa ketika dirumah sakit, saksi melihat telinga korban terluka, usus keluar, dan tidak melihat ada darah karena masih gelap, kemudian sekitar jam 06:00 WITA pagi korban meninggal.
- Bahwa malam itu saksi juga melihat ada kebakaran pada jendela rumah Daeng Nassa dan becak milik Pudding;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran pada malam tersebut, demikian juga siapa yang melukai korban, saksi tidak mengetahuinya.

Saksi Daeng Lia menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pembunuhan terhadap korban Sangir Efendi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2011 sekitar jam 03:00 WITA di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII, Nomor 4 Kota Makassar, rumah saksi berhadapan dengan rumah korban, dengan jarak \pm 2 meter;
- Bahwa malam itu saksi tidur dirumah dengan suami lalu terbangun karena teriakan korban “api-api” dan saksi ikut memadamkan api dirumah milik Daeng Nassa, setelah api padam saksi mencium bau bensin dari rumah yang terbakar tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi melihat korban diangkat oleh warga ke atas becak untuk mendapat pertolongan ke rumah sakit, karena korban di tikam di bagian perut di bawah pusat, korban meninggal jam 06:WITA, setelah meninggal, saksi baru menjenguk ke rumah sakit;
- Bahwa jendela rumah yang terbakar adalah rumah saksi yang berada di depan rumah korban dan becak yang terbakar yang di parkir di samping rumah korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran pada malam tersebut, demikian juga siapa yang menikam korban, saksi tidak mengetahuinya.

Saksi Daeng Lumu menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pembunuhan terhadap korban Sangir Efendi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2011 sekitar jam 03:00 WITA di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII, Nomor 4 Kota Makassar;
- Bahwa menurut informasi dari Daeng Taba kepada saksi, korban meninggal sekitar jam 06:00 WITA, lalu saksi pergi melihat korban di Rumah Sakit Faisal, ketika itu saksi melihat korban luka di bagian perut dan bagian telinga;
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak di kenal, selanjutnya korban dikebumikan dikampung orang tuanya di Malino;
- Bahwa selain penganiayaan terhadap korban malam itu, juga terjadi pembakaran jendela rumah dan pembakaran becak Daeng Pudding yang jaraknya \pm 10 meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran pada malam tersebut, demikian juga siapa yang melukai korban, saksi tidak mengetahuinya.

Saksi Daeng Taha menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pembunuhan terhadap korban Sangir Efendi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2011 sekitar jam 03:00 WITA di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII, Nomor 4 Kota Makassar, dan saksi serumah dengan korban, dan hanya dibatasi oleh sebuah tripleks;
- Bahwa ketika ada orang berteriak “api”, saksi kemudian terbangun dari tidur pada malam itu, dan yang duluan terbangun ketika itu adalah korban;
- Bahwa ketika korban keluar membawa air untuk memadamkan api, seseorang memarangi kepala korban, karena korban menghindari yang kena hanya telinga dan nyaris putus;
- Bahwa setelah itu, korban masuk kamar di ikuti 2 (dua) orang, 1 (satu) orang menusuk di bagian bawah pusat, dan satu orang lagi di tulang rusuk sebelah kanannya dan kelihatan keluar ususnya;

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita korban sebelum meninggal dunia jam 06:00 WITA, karena pada malam itu saksi yang membawa korban dengan becak;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia, saksi mendengar ada 5 (lima) orang yang terlibat pembunuhan korban, dan di antaranya ada beberapa orang tentara.

Saksi Nur Afia menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 1 Aladin BAso Tomo alias Alan, karena saksi adalah isteri sah dari terdakwa satu dan punya anak satu orang;
- Bahwa saksi satu rumah dengan suami saksi di Antang, setiap malam suami selalu pulang kerumah, saksi tidak kenal dengan terdakwa 2 (isteri ke-2 terdakwa 1);
- Bahwa setahu saksi, suami saksi tidak pernah bermasalah dengan orang lain, baru setelah dipanggil oleh Polwiltabes Makassar, saksi baru mengetahui bahwa suami saksi dituduh membunuh;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2011 suami saksi pulang kerumah di Antang sekitar jam 02:00 WITA ketika itu saksi membukakan pintu;
- Bahwa suami saksi bekerja di karaoke NAF, ketika itu masuk sift ke-2 (masuk kerja jam 07:00 WITA bekerja sampai dengan jam 10:00 WITA malam).

2. Alat Bukti Surat :

- Surat Visum Et Revertum Nomor 01/RSSIF/I/OS tanggal 4 Januari 2011 menerangkan bahwa korban Sangir Efendi meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan tampak luka iris ukuran 4 cm memanjang sampai belakang telinga, dan tampak luka tusuk ukuran 2,5 cm, tepi sudut lancip, dasar luka tembus (tampak bagian usus keluar), pendarahan aktif dan keluar sisa makanan, kesimpulan disebabkan oleh benda tajam yang menikam dan korban meninggal (berdasarkan hasil pemeriksaan dari dr. Abdul Rahman pada Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar);

- Berita acara pemeriksaan konfrontir tanggal 8 Januari 2011 terhadap saksi Samsuddin alias cimen, Arisdianto, Budi Prasetyo, Sigit Wahyudi, dan Handoko bersama tersangka 1 Aladin Baso Tomo, dan bersama tersangka 2 Nahriah Abu Nonni alias Yanti dibuat oleh penyidik pembantu Briptu Rahmat Hidayat Bur., S.Pd.
- Berita acara pemeriksaan konfrontasi langsung tanggal 4 Februari 2011, pemeriksaan konfrontir dilakukan terhadap tersangka 1 Aladin Baso Tomo alias Alan, saksi Samsuddin alias cimen, Arisdianto, Budi Prasetyo, Sigit Wahyudi, dan Handoko dari pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan ke-11 dibuat oleh penyidik Ipda Syahwan, S.H., pada Polrestabes Makassar.
- Berita acara penyitaan tanggal 12 Januari 2011 dengan menyita barang bukti dari salah seorang anggota TNI AD atas nama Pratu Samsuddin berupa sebilah parang berikut sarungnya warna cokelat dengan panjang 57 cm dan lebar 4 cm, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna silver dengan nomor polisi DD 2878 JK, yang menyita Lettu. CPM. Ajumalahi, S.H. pada POMDAM VII Wirabuana Makassar.
- Berita acara penyitaan tanggal 12 Januari 2011 dengan menyita barang bukti dari salah seorang anggota TNI AD atas nama Pratu Arusdianto berupa sebilah parang berikut sarungnya warna cokelat dengan panjang 57 cm dan lebar 4 cm, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna silver dengan nomor polisi DD 2878 JK, yang menyita Lettu. CPM. Ajumalahi, S.H. pada POMDAM VII Wirabuana Makassar.
- Berita acara penyitaan tanggal 12 Januari 2011 dengan menyita barang bukti dari salah seorang anggota TNI AD atas nama Pratu Budi Prasetyo berupa sebilah parang berikut sarungnya warna cokelat dengan panjang 57 cm dan lebar 4 cm, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna silver dengan nomor polisi DD 2878 JK, yang menyita Lettu. CPM. Ajumalahi, S.H. pada POMDAM VII Wirabuana Makassar.
- Berita acara penyitaan tanggal 12 Januari 2011 dengan menyita barang bukti dari salah seorang anggota TNI AD atas nama Pratu Sigit Wahyudi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z

berwarna biru dengan nomor polisi DD 4754 JP, yang menyita Lettu. CPM. Ajumalahi, S.H. pada POMDAM VII Wirabuana Makassar.

- Berita acara olah TKP tanggal 4 Januari 2011 sehubungan dengan terjadinya pembunuhan di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII, Nomor 4, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, secara umum pemotretan di Jalan Banta-Bantaeng dari arah timur ke barat, Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII dari utara ke selatan, rumah kost pelajar SMK Tritunggal 45 Makassar, anggota Polsek Rappocini berada di TKP melakukan pengamanan secara khusus di luar area TKP di luar rumah kost korban terdapat 1 (satu) unit becak milik tetangga korban yang telah terbakar serta dinding rumah tetangga bagian depan telah dibakar oleh seseorang, diruangan dalam rumah kost jenis rumah panggung petugas menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik korban terparkir dalam rumah disamping motor adalah letak korban tergeletak bersimbah darah, ditemukan oleh warga tiga tempat penusukan bagian perut, dada, dan telinga, setelah itu korban dibawa ke rumah sakit, berita acara olah TKP dibuat oleh penyidik pembantu Brigpol. Abd. Jabbar, pada Polrestabes Makasar.
- Berita acara pemotretan pada tanggal 4 Januari 2011 gambar sketsa tempat kejadian perkara di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII, Nomor 4, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar keterangan gambar mesjid Mujahidin, rumah kos korban lorong VIII, pedagang kaki lima, becak yang dibakar dan jendela rumah yang terbakar. Foto 1 panorama umum, situasi Jalan Banta-Bantaeng menghadap ke Timur sampai dengan foto ke-11 nomor 06, becak tetangga korban yang di parkir di depan rumah juga telah dibakar oleh pelaku, bekas pembakaran menghadap ke Selatan. Berita acara pemotretan dibuat oleh penyidik pembantu Brigpol. Abd. Jabbar, pada Polrestabes Makasar.
- Berita acara penunjukan lokasi tanggal 10 Januari 2011 telah melakukan meminta kepada tersangka Aladin Baso Tomo alias Alan untuk menunjukkan lokasi atau tempat pembelian bahan bakar minyak berupa bensin botolan di sekitar Jalan Urip Sumoharjo namun tersangka tidak dapat menunjukkan lokasi tempat pembelian bahan bakar berupa bensin botol

dengan alasan sudah lupa. Berita acara penunjukan lokasi dibuat oleh penyidik Ipda. H. Syahwan, S.H. pada Polrestabes Makassar.

- Berita acara rekonstruksi 26 Februari 2011 dari foto angka pertama tersangka 1 Aladin Baso Tomo, dan bersama tersangka 2 Nahriah Abu Nonni alias Yanti dan Samsuddin alias Cimeng (tersangka di POM) dan juga Sahabuddin alias Aan berada di kamar tempat tersangka 1 Aladin Baso Tomo alias Alan kos tempat tinggal sampai dengan adegan ke-16, tersangka Aladin Baso Tomo alias Alan bersama Sahabuddin (DPO), Samsuddin alias Cimeng (tersangka di POM), Handoko (tersangka di POM), Budi Prasetyo (tersangka di POM), Sigit Wahyudi (tersangka di POM), Arisdianto (tersangka di POM), dan Edi (DPO), lari meninggalkan tempat kejadian, setelah berita acara rekonstruksi ini dibuat dibacakan kembali, diperlihatkan foto adegan pada masing-masing yang terlibat dalam rekonstruksi dan mereka dinyatakan setuju dan membenarkan semua adegan dan foto yang terlampir pada berita acara rekonstruksi dan untuk menguatkannya, masing-masing membubuhkan tanda tangannya ini yaitu : Aladin Baso Tomo alias Alan bersama Sahabuddin (DPO), Samsuddin alias Cimeng (tersangka di POM), Handoko (tersangka di POM), Budi Prasetyo (tersangka di POM), Sigit Wahyudi (tersangka di POM), Arisdianto (tersangka di POM), dan Edi (DPO), yang terlibat dalam rekonstruksi tersangka 1 Aladin Baso Tomo, dan bersama tersangka 2 Nahriah Abu Nonni alias Yanti. Berita acara rekonstruksi dibuat oleh penyidik AKP. Hamid Andri, S.Sik., pada Polrestabes Makassar.

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, maka diperoleh petunjuk bahwa :

Aladin Baso Tomo alias Alan (Terdakwa 1) dan Nahria Abu Noni alias Yanti (Terdakwa 2) serta bersama Samsuddin alias Cimeng, Budy Prasetyo, Aris Dyanto,

Handoko, dan Sigit Wahyudi (yang kesemuanya di sidang pada persidangan tersendiri yaitu di Mahkamah Militer) pada hari Selasa Tanggal 4 Januari 2011 sekitar Pukul 03:00 WITA atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan merampas nyawa orang lain, dimana Aladin Baso Tomo alias Alan dan Nahria Abu Noni alias Yanti (yang keduanya adalah suami isteri) menyuruh melakukan tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan tersebut berawal pada tanggal 31 Desember 2010 menjelang tahun baru (pergantian tahun 2010 ke tahun 2011), rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti (isteri dari Aladin Baso Tomo alias Alan) dirusak oleh kurang lebih 8 (delapan) orang, diantaranya Moha, Ashari, Bagong, dan Pudding. Mereka merusak rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti dengan cara melemparkan batu ke jendela rumah kos hingga pecah, dan motor yang terparkir di rumah kos juga dirusak dengan cara di tebas dan dihantam dengan benda keras berupa balok kayu dan masuk ke rumah kos dan mengambil barang-barang berupa pakaian, karena dipicu hal tersebut Aladin Baso Tomo alias Alan dendam dan menghubungi rekannya Samsuddin alias Cimeng (selaku anggota TNI AD Batalyon Kaveleri 10 Serbu) meminta tolong membalaskan dendamnya dengan cara memberi pelajaran kepada para pelaku yang telah merusak rumah kos milik isterinya, dan kemudian Samsuddin alias Cimeng menyanggupinya dengan mengatakan bahwa “tenangmeki nanti saya bawa anggota”.

Pada 4 Januari 2011 Pukul 02:00 WITA Samsuddin alias Cimeng menghubungi Aladin Baso Tomo alias Alan melalui telepon genggam untuk menemuinya di Jalan Faisal, saat pertemuan Samsuddin alias Cimeng dan kedelapan temannya meminta kepada Aladin Baso Tomo alias Alan untuk menunjukkan tempat tinggal pelaku pengrusakan rumah kos milik isterinya tersebut. Selanjutnya Aladin Baso Tomo alias Alan bersama Samsuddin alias Cimeng dan kedelapan temannya sebelum ke TKP (tempat kejadian perkara) membeli satu botol Aqua besar berisi bensin, dengan mengendarai motor Aladin Baso Tomo alias Alan yang berboncengan dengan isterinya (Nahria Abu Noni alias Yanti) dan bersama Samsuddin alias Cimeng serta kedelapan temannya sampai di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Kota Makassar, kemudian menyiramkan bensin

ke sebuah becak terparkir di Lorong VII tersebut lalu dibakar, tak hanya itu Samsuddin alias Cimeng serta kedelapan temannya juga menyiramkan bensin kerumah para pelaku pengrusakan rumah kos milik isteri Aladin Baso Tomo alias Alan.

Pada saat kejadian Samsuddin alias Cimeng melihat Aladin Baso Tomo alias Alan memegang sebilah parang sedangkan Aris Dyanto (teman dari Samsuddin alias Cimeng) memegang sangkur, lalu Aladin Baso Tomo alias Alan memarangi kepala korban Sangir Efendi dan hanya mengenai telinga korban hingga putus, dan Aris Dyanto menusuk bagian pusat korban hingga bersimbah darah, kemudian warga berdatangan dan membawa korban Sangir Efendi ke Rumah Sakit, namun beberapa saat setelah di rumah sakit korban Sangir Efendi meninggal dunia.

4. Alat bukti keterangan terdakwa (Aladin Baso Tomo alias Alan dan Nahria Abu Nonni alias Yanti), yang di uraikan sebagai berikut :

Terdakwa Aladin Baso Tomo alias Alan, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa mengakui tindak pidana pembunuhan korban Efendi terjadi pada hari Selasa, 4 Januari 2011 Pukul 03:00 WITA, di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Nomor 4, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tepatnya di rumah Bagong, dikarenakan pada hari Selasa, 4 Januari 2011 Pukul 09:00 WITA terdakwa ditelpon oleh isteri terdakwa yakni terdakwa 2 (Nahria Abu Nonni alias Yanti) sewaktu terdakwa masih berada di rumah terdakwa di Jalan Antang Raya Pannara Kota Makassar, menyampaikan telah terjadi tindak pidana pembunuhan.
- Benar terdakwa mengaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap diri korban Efendi dilakukan oleh Pratu Samsuddin alias Cimeng, Pratu Handoko dan temannya.
- Benar terdakwa mengaku mengetahui bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 menjelang tahun baru (pergantian tahun 2010 ke tahun 2011), rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti (isteri dari Aladin Baso Tomo alias Alan) dirusak oleh kurang lebih 8 (delapan) orang,

diantaranya Moha, Ashari, Bagong, dan Pudding. Mereka merusak rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti dengan cara melemparkan batu ke jendela rumah kos hingga pecah, dan motor yang terparkir di rumah kos juga dirusak dengan cara di tebas dan dihantam dengan benda keras berupa balok kayu dan masuk ke rumah kos dan mengambil barang-barang berupa pakaian.

- Benar bahwa terdakwa mengaku atas kejadian pengrusakan milik isteri terdakwa menyampaikan kepada Pratu Samsuddin alias Cimeng bahwa rumah isteri terdakwa di rusak dan meminta pertolongan.
- Benar bahwa terdakwa mengaku pada tanggal 1 Januari 2011, terdakwa berada di tempat kerja, tiba-tiba terdakwa di telpon oleh Pratu Samsuddin alias Cimeng dan bertanya kepada terdakwa perihal pengrusakan isteri terdakwa yakni terdakwa 2 (Nahria Abu Nonni alias Yanti), kemudian terdakwa jelaskan pelaku pengrusakan adalah masyarakat yang bertempat tinggal di di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Nomor 4, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan meminta tolong membalaskan dendamnya dengan cara memberi pelajaran kepada para pelaku yang telah merusak rumah kos milik isterinya, dan kemudian Samsuddin alias Cimeng menyanggupinya dengan mengatakan bahwa "tenangmeki nanti saya bawa anggota".
- Benar bahwa terdakwa mengaku tanggal 3 Januari 2011 Pukul 22:00 WITA Pratu Samsuddin alias Cimeng menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa dia sedang minum-minuman keras di asrama Kodam di Jalan Baji Gau Kota Makassar, disampaikannya melalui handphone, dan akan melakukan pergerakan ke Lorong VII Jalan Banta-Bantaeng dimana tempat tinggal dari para pelaku pengrusakan rumah kost terdakwa yakni terdakwa 2 (Nahria Abu Nonni alias Yanti), dan terdakwa 1 Aladin Baso Tomo alias Alan mengiyakan.

Terdakwa Nahria Abu Nonni alias Yanti, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa 2 mengakui tindak pidana pembunuhan korban Efendi terjadi pada hari Selasa, 4 Januari 2011 Pukul 03:00 WITA, di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Nomor 4, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tepatnya di rumah Bagong, dikarenakan pada hari Selasa, 4 Januari 2011 Pukul 09:00 WITA terdakwa 2 menelpon suami terdakwa yakni terdakwa 1 (Aladin Baso

Tomo alias Alan) sewaktu terdakwa masih berada di rumah terdakwa di Jalan Antang Raya Pannara Kota Makassar, menyampaikan telah terjadi tindak pidana pembunuhan.

- Benar terdakwa 2 mengetahui bahwa terdakwa 1 yang menuruh melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap diri korban Efendi dilakukan oleh Pratu Samsuddin alias Cimeng, Pratu Handoko dan temannya.
- Benar terdakwa 2 mengaku bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 menjelang tahun baru (pergantian tahun 2010 ke tahun 2011), rumah kos milik terdakwa 2 Nahria Abu Noni alias Yanti (isteri dari Aladin Baso Tomo alias Alan) dirusak oleh kurang lebih 8 (delapan) orang, diantaranya Moha, Ashari, Bagong, dan Pudding. Mereka merusak rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti dengan cara melemparkan batu ke jendela rumah kos hingga pecah, dan motor yang terparkir di rumah kos juga dirusak dengan cara di tebas dan dihantam dengan benda keras berupa balok kayu dan masuk ke rumah kos dan mengambil barang-barang berupa pakaian.
- Benar bahwa terdakwa 2 mengaku atas kejadian pengrusakan milik isteri terdakwa menyampaikan kepada Pratu Samsuddin alias Cimeng bahwa rumah terdakwa 2 di rusak dan meminta pertolongan.
- Benar bahwa terdakwa 2 mengetahui pada tanggal 1 Januari 2011, terdakwa 1 berada di tempat kerja, tiba-tiba terdakwa 1 di telpon oleh Pratu Samsuddin alias Cimeng dan bertanya kepada terdakwa perihal pengrusakan isteri terdakwa yakni terdakwa 2 (Nahria Abu Nonni alias Yanti), kemudian terdakwa jelaskan pelaku pengrusakan adalah masyarakat yang bertempat tinggal di di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Nomor 4, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan meminta tolong membalaskan dendamnya dengan cara memberi pelajaran kepada para pelaku yang telah merusak rumah kos milik isterinya, dan kemudian Samsuddin alias Cimeng menyanggupinya dengan mengatakan bahwa “tenangmeki nanti saya bawa anggota”.
- Benar bahwa terdakwa 2 mengetahui tanggal 3 Januari 2011 Pukul 22:00 WITA Pratu Samsuddin alias Cimeng menghubungi terdakwa 1 dan menyampaikan bahwa dia sedang minum-minuman keras di asrama Kodam di Jalan Baji Gau Kota Makassar, disampaikannya melalui handphone, dan akan melakukan pergerakan ke Lorong VII Jalan Banta-Bantaeng dimana tempat tinggal dari para pelaku pengrusakan rumah kost milik terdakwa 2

(Nahria Abu Nonni alias Yanti), dan terdakwa 1 Aladin Baso Tomo alias Alan mengiyakan.

- Benar bahwa terdakwa 2 mengaku ngotot dalam hal adalah suami terdakwa 2 yakni terdakwa 1 (Aladin Baso Tomo alias Alan) berkeinginan sekali untuk melakukan balas dendam terhadap pelaku pengrusakan sepeda motornya dan motor saudaranya, dan rumah kos pada malam tahun baru, hal itu sering terulang dari mulut suami terdakwa 1 (Aladin Baso Tomo alias Alan) yang mengatakan “saya sakit hati sekali”.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa (Aladin Baso Tomo alias Alan dan Nahria Abu Nonni alias Yanti) dengan dakwaan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan, maka penuntut umum pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Juni 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan antara lain sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1, Aladin Baso Tomo alias Alan, dan terdakwa 2, Nahria Abu Nonni alias Yanti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan pertama subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1, Aladin Baso Tomo alias Alan, dan terdakwa 2, Nahria Abu Nonni alias Yanti dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa satu unit motor Bajaj Pulsar warna merah dengan nomor polisi DD 3958 JT atas nama Aladin dan kunci kontak, satu lembar STNK DD 3958 JT atas nama Aladin di kembalikan pada terdakwa 1 Aladin Baso Tomo alias Alan, dan satu lembar jaket hitam bis pink

di depan bertuliskan *Athletic Word*, satu helm hitam bertuliskan Bajaj, satu lembar celana panjang jeans abu-abu dan satu lembar baju kaos warna hitam di depan bertuliskan *Tree Second* di rampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Komentar Penulis

Berdasarkan posisi kasus, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa 1, Aladin Baso Tomo alias Alan, dan terdakwa 2, Nahria Abu Nonni alias Yanti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (sebagaimana dakwaan pertama subsidair Jaksa Penuntut Umum). Uraian tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis pada hari Senin tanggal 01 April 2013 dengan Bapak Makmur, S.H., M.H. (salah satu hakim) di Pengadilan Negeri Makassar yang mengatakan bahwa :

“Penerapan hukum pidana yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai, ini terlihat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti di dalam sidang pengadilan, sehingga majelis hakim memutuskan para terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ini berdasarkan dari keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga segala peristiwa hukum yang terungkap dan terbukti di sidang pengadilan menunjukkan bahwa para terdakwa bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan”.

Menurut pendapat penulis, Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat mengajukan para terdakwa ke persidangan dengan surat dakwaan yang di susun secara subsideritas alternative, dengan dakwaan pertama primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Disini Jaksa Penuntut Umum sangat berhati-hati sekali dengan mendakwa para terdakwa agar tidak dapat lolos dari jeratan hukum yang diakibatkan unsur tindak pidana yang didakwakannya tidak terpenuhi salah satunya atau kesemuanya, sehingga para terdakwa dapat bebas dari segala tuntutan hukum.

Pasal yang disebut di dalam persidangan merupakan suatu ketentuan yang dihubungkan atau dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, Di dalam suatu persidangan seringkali terdakwa diancam lebih dari 1 (satu) dakwaan (sebagaimana kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini) maka dibuat ada beberapa dakwaan, yakni Primair dan Subsidair merupakan tingkatan dakwaan. Primair merupakan dakwaan yang paling berat dan harus dibuktikan terlebih dahulu sedangkan Subsidair Subsidair dakwaan yang lebih ringan, Sehingga jika dalam pembuktian terdakwa tidak terbukti melakukan dakwaan Primair maka Jaksa dapat menjerat terdakwa dengan dakwaan Subsidair dan jika terdakwa tidak terbukti melakukan

dakwaan Subsider maka Jaksa dapat menjerat dengan dakwaan Lebih Subsidair dan seterusnya.

Menurut penulis kelalaian penuntutan pada umumnya bermula pada kekurangcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan Surat Dakwaan, dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan. Jaksa Penuntut Umum perlu menyadari bahwa Surat Dakwaan merupakan mahkota baginya yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap. Mengingat bahwa peranan Surat Dakwaan menempati posisi sentral dalam peneriksaan perkara pidana di Pengadilan dan Surat Dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut adanya kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan Surat Dakwaan.

Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan, maka kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan perlu terus ditingkatkan dan sehubungan dengan itu diperlukan bimbingan serta pengendalian agar para Jaksa Penuntut Umum mampu menyusun Surat Dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas kejaksaan dibidang penuntutan, karena ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

- Bagi Pengadilan / Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian / analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- Bagi terdakwa / Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Oleh karena itu, menurut penulis dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-429/Mks/Ep/0311 (pada kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini) tertanggal 28 Februari 2011 sudah sangat tepat, dan sangat berhati-hati.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Dalam Putusan Perkara Nomor 548 / Pid.B / 2011 / PN.Mks.

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana

kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 548 / Pid.B / 2011 / PN.Mks. yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan majelis hakim terhadap turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa 1, Aladin Baso Tomo alias Alan, dan terdakwa 2, Nahria Abu Nonni alias Yanti, adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan lisan dari para terdakwa para persidangan hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 yang pada pokoknya memohon supaya para terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor PDM-429/Mks/Ep/0311 tertanggal 28 Februari 2011;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang di susun secara subsideritas alternative, dengan dakwaan pertama primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa dalam hal ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun karena para terdakwa dengan Pratu Samsuddin alias Cimeng dan kawan-kawan, sebelumnya tidak pernah merencanakan untuk memberi pelajaran kepada korban Sangir Efendi (bukan salah satu dari pelaku pengrusakan rumah kos milik terdakwa Nahria Abu Nonni alias Yanti) akan tetapi

adalah kepada Bagong, Moha, dan Puddin (yang merupakan para pelaku pengrusakan rumah kos milik terdakwa Nahria Abu Nonni alias Yanti), maka oleh karena itu unsur ke-3 (dengan direncanakan terlebih dahulu pembunuhan), oleh karena itu majelis hakim menganggap dakwaan pertama primair dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas tidak terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu para terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama primair, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan pertama subsidair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa walaupun para terdakwa terbukti hanya menyuruh Pratu Samsuddin alias Cimeng dan kawan-kawan memberi pelajaran kepada Bagong, Moha, dan Puddin, namun kematian korban dalam hal ini akibat dari perbuatan dari Pratu Samsuddin alias Cimeng dan kawan-kawan tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab para terdakwa, sehingga dengan demikian unsur menyuruh melakukan dalam hal ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan, Nampak dengan jelas bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan yang pertama subsidair Jaksa Penuntut Umum terbukti di persidangan, sehingga oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban bernama Sangir Efendi, korban tersebut tidak ada hubungannya dengan pengrusakan rumah dan sepeda motor milik para terdakwa tersebut, korban hanya kebetulan satu rumah dengan Bagong;

Menimbang bahwa oleh karena pada diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu perbuatan para terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindak pidana yaitu “menyuruh melakukan pembunuhan” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa

yang diajukan di persidangan setelah disesuaikan satu dengan lainnya saling bersesuaian.

Menimbang bahwa sebelum para terdakwa di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberitakan maupun meringankan para terdakwa.

Hal-hal yang memberitakan:

- Bahwa para terdakwa telah memberi minum-minum para pelaku sebelum kejadian

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

2. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa 1 Aladin Baso Tomo alias Alan, terdakwa 2 Nahria Abu Nonni alias Yanti, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primair;
- Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Menyatakan terdakwa 1 Aladin Baso Tomo alias Alan, terdakwa 2 Nahria Abu Nonni alias Yanti, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan pembunuhan”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;

- Menyatakan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) unit motor Bajaj Pulsar warna merah dengan nomor polisi DD 3958 JT atas nama Aladin dan kunci kontak, satu lembar STNK DD 3958 JT atas nama Aladin di kembalikan pada terdakwa 1 Aladin Baso Tomo alias Alan; dan
1 (satu) lembar jaket hitam bis pink di depan bertuliskan *Athletic Word*, satu helm hitam bertuliskan Bajaj, satu lembar celana panjang jeans abu-abu dan satu lembar baju kaos warna hitam di depan bertuliskan *Tree Second*, dikembalikan kepada yang berhak;
- Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Komentar Penulis

Dari hasil pemaparan diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa 1 Aladin Baso Tomo alias Alan, dan terdakwa 2, Nahria Abu Nonni alias Yanti terbukti di persidangan “menyuruh melakukan tindak pidana pembunuhan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama subsidair dari Jaksa Penuntut Umum.

Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilanggar oleh para terdakwa :

Unsur barangsiapa :

Yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum berupa manusia yakni terdakwa 1 (Aladin Baso Tomo alias Alan), dan terdakwa 2 (Nahria Abu Nonni alias Yanti) yang diajukan dalam

persidangan ini di dakwa melakukan perbuatan pidana oleh karena itu mereka para terdakwa selaku subjek hukum, maka unsur ini terpenuhi.

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang:

Sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa Aladin Baso Tomo alias Alan (Terdakwa 1) dan Nahria Abu Noni alias Yanti (Terdakwa 2) serta bersama Samsuddin alias Cimeng, Budy Prasetyo, Aris Dyanto, Handoko, dan Sigit Wahyudi (yang kesemuanya di sidang pada persidangan tersendiri yaitu di Mahkamah Militer) pada hari Selasa Tanggal 4 Januari 2011 sekitar Pukul 03:00 WITA atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Kota Makassar, atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, merampas nyawa orang lain, dimana Aladin Baso Tomo alias Alan dan Nahria Abu Noni alias Yanti (yang keduanya adalah suami isteri) menyuruh melakukan tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan tersebut berawal pada tanggal 31 Desember 2010 menjelang tahun baru (pergantian tahun 2010 ke tahun 2011), rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti (isteri dari Aladin Baso Tomo alias Alan) dirusak oleh kurang lebih 8 (delapan) orang, diantaranya Moha, Ashari, Bagong, dan Pudding. Mereka merusak rumah kos milik Nahria Abu Noni alias Yanti

dengan cara melemparkan batu ke jendela rumah kos hingga pecah, dan motor yang terparkir di rumah kos juga dirusak dengan cara di tebas dan dihantam dengan benda keras berupa balok kayu dan masuk ke rumah kos dan mengambil barang-barang berupa pakaian, karena dipicu hal tersebut Aladin Baso Tomo alias Alan dendam dan menghubungi rekannya Samsuddin alias Cimeng (selaku anggota TNI AD Batalyon Kavaleri 10 Serbu) meminta tolong membalaskan dendamnya dengan cara memberi pelajaran kepada para pelaku yang telah merusak rumah kos milik isterinya, dan kemudian Samsuddin alias Cimeng menyanggupinya dengan mengatakan bahwa “tenangmeki nanti saya bawa anggota”.

Pada 4 Januari 2011 Pukul 02:00 WITA Samsuddin alias Cimeng menghubungi Aladin Baso Tomo alias Alan melalui telepon genggam untuk menemuinya di Jalan Faisal, saat pertemuan Samsuddin alias Cimeng dan kedelapan temannya meminta kepada Aladin Baso Tomo alias Alan untuk menunjukkan tempat tinggal pelaku pengrusakan rumah kos milik isterinya tersebut. Selanjutnya Aladin Baso Tomo alias Alan bersama Samsuddin alias Cimeng dan kedelapan temannya sebelum ke TKP (tempat kejadian perkara) membeli satu botol Aqua besar berisi bensin, dengan mengendarai motor Aladin Baso Tomo alias Alan yang berboncengan dengan

isterinya (Nahria Abu Noni alias Yanti) dan bersama Samsuddin alias Cimeng serta kedelapan temannya sampai di Jalan Banta-Bantaeng Lorong VII Kota Makassar, kemudian menyiramkan bensin ke sebuah becak terparkir di Lorong VII tersebut lalu dibakar, tak hanya itu Samsuddin alias Cimeng serta kedelapan temannya juga menyiramkan bensin kerumah para pelaku pengrusakan rumah kos milik isteri Aladin Baso Tomo alias Alan.

Pada saat kejadian Samsuddin alias Cimeng melihat Aladin Baso Tomo alias Alan memegang sebilah parang sedangkan Aris Dyanto (teman dari Samsuddin alias Cimeng) memegang sangkur, lalu Aladin Baso Tomo alias Alan memarangi kepala korban Sangir Efendi dan hanya mengenai telinga korban hingga putus, dan Aris Dyanto menusuk bagian pusat korban hingga bersimbah darah, kemudian warga berdatangan dan membawa korban Sangir Efendi ke Rumah Sakit, namun beberapa saat setelah di rumah sakit korban Sangir Efendi meninggal dunia, sesuai keterangan saksi-saksi (saksi Agus Salim Daeng Ngerang alias Agus, saksi Daeng Lia, saksi Daeng Lumu, saksi Daeng Taha, dan saksi Nur Afia), serta keterangan para terdakwa (Aladin Baso Tomo alias Alan dan Nahria Abu Noni alias Yanti), maka unsur ini terpenuhi.

Unsur turut melakukan:

Sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa Aladin Baso Tomo alias Alan (Terdakwa 1) dan Nahria Abu Noni alias Yanti (Terdakwa 2) serta bersama Samsuddin alias Cimeng, Budy Prasetyo, Aris Dyanto, Handoko, dan Sigit Wahyudi (yang kesemuanya di sidang pada persidangan tersendiri yaitu di Mahkamah Militer) melakukan penganiayaan secara bersama-sama sehingga korban (Sangir Efendi) meninggal dunia, dan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor 01/RSSIF/II/OS tanggal 4 Januari 2011 menerangkan bahwa korban Sangir Efendi meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan tampak luka iris ukuran 4 cm memanjang sampai belakang telinga, dan tampak luka tusuk ukuran 2,5 cm, tepi sudut lancip, dasar luka tembus (tampak bagian usus keluar), pendarahan aktif dan keluar sisa makanan, kesimpulan disebabkan oleh benda tajam yang menikam dan korban meninggal (berdasarkan hasil pemeriksaan dari dr. Abdul Rahman pada Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi (saksi Agus Salim Daeng Ngerang alias Agus, saksi Daeng Lia, saksi Daeng Lumu, saksi Daeng Taha, dan saksi Nur Afia), serta keterangan para terdakwa (Aladin Baso Tomo alias Alan dan Nahria Abu Noni alias Yanti), maka unsur ini terpenuhi.

Dari uraian unsur-unsur Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang telah penulis uraikan di atas, maka sekilas terbukti bahwa memang para terdakwa (Aladin Baso Tomo alias Alan dan Nahria Abu Noni alias Yanti) telah melanggar pasal tersebut dan telah memenuhi unsur-unsurnya, namun penulis berpendapat lain, menurut pendapat penulis seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman “turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua subsidair dari Jaksa Penuntut Umum, ini di karenakan menurut penulis, jika kita cermati peristiwa hukumnya, bahwa kronologis kejadian hingga sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Pratu Samsuddin alias Cimeng, para terdakwa (Aladin Baso Tomo alias Alan, dan Nahria Abu Nonni alias Yanti) hanya menyuruh Pratu Samsuddin alias Cimeng dan kawan-kawan dan bersama-sama (turut serta) memberi pelajaran kepada pelaku pengrusakan rumah kos terdakwa 2 (Nahria Abu Nonni alias Yanti) yaitu Bagong.

Tidak ada kata-kata membunuh, oleh karena itu menurut penulis hakim seharusnya menggarisbawahi kalimat “memberi pelajaran” yang di ucapkan terdakwa 1 (Aladin Baso Tomo alias Alan) kepada Pratu Samsuddin alias Cimeng dan kawan-kawan melalui *hanphone*, kata “memberi pelajaran” menurut penulis tidak harus dengan membunuh, bisa saja dengan menganiaya, namun karena

tidak disangka sebelumnya penganiayaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, dan tidak ada niat membunuh, baik pada saat sebelum tindak pidana terjadi, maupun pada saat terjadinya tindak pidana, oleh sebab itu menurut penulis lebih tepat jika putusan pengadilan (majelis hakim) memutus para terdakwa dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat, dengan mengajukan para terdakwa ke persidangan dengan surat dakwaan yang di susun secara subsideritas alternative, dengan dakwaan pertama primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Disini Jaksa Penuntut Umum sangat berhati-hati sekali dengan mendakwa para terdakwa agar tidak dapat lolos dari jeratan hukum yang diakibatkan unsur tindak pidana yang didakwakan nya tidak terpenuhi salah satunya atau kesemuanya, sehingga para terdakwa dapat bebas dari segala tuntutan hukum.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa Aladin Baso Tomo dan Nahria Abu Nonni dalam putusan perkara nomor :

548 / Pid.B / 2011 / PN.Mks dalam pertimbangan hukum oleh hakim kurang tepat menurut pendapat penulis seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman “turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua subsidair dari Jaksa Penuntut Umum, ini di karenakan menurut penulis, jika kita cermati peristiwa hukumnya, bahwa kronologis kejadian hingga sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Pratu Samsuddin alias Cimeng, para terdakwa (Aladin Baso Tomo alias Alan, dan Nahria Abu Nonni alias Yanti) hanya menyuruh Pratu Samsuddin alias Cimeng dan kawan-kawan dan bersama-sama (turut serta) memberi pelajaran kepada pelaku pengrusakan rumah kos terdakwa 2 (Nahria Abu Nonni alias Yanti) yaitu Bagong, dan tidak ada kata-kata membunuh.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih sadar dalam melakukan interaksi terhadap sesama masyarakat lain, berfikiran jernih dan bersikap sadar merupakan hal yang paling baik dalam menghadapi setiap orang yang baik maupun yang jahat terhadap pribadi dan harta benda yang kita miliki, agar

kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang yang bermotif balas dendam sangatlah merugikan baik dari pihak pelaku maupun korban, terlebih lagi jika korbannya salah sasaran, sebagaimana yang penulis bahas pada skripsi ini.

2. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih jeli lagi, karena selain perlu mempertimbangkan faktor sosiologis dari terdakwa juga harus mempertimbangkan akibat dari perbuatan para terdakwa termasuk juga kerugian yang ditimbulkan bagi pihak korban, hakim juga harus memperhatikan dengan baik antara peristiwa hukum yang terjadi dengan dakwaan dari Jkasa Penuntut Umum agar pertimbangan hakim dapat tepat sasaran, tegaknya hukum, dan putusan tersebut kedepannya dapat lebih obyektif.
3. Penuntut Umum dan Hakim dalam menentukan kualifikasi (jenis) penyertaan para pelaku benar-benar tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Bagian 3, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Andi Zainal Abidin, 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Antonius Sudirman, 2009. *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, Semarang: BP Undip Semarang.

Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

J.M. van Bemmelen, 1991. *Hukum Pidana 2, Hukum Penitentier*, Bandung: Bina Cipta.

_____, 1987. *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiel Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan, Cetakan Ke-2, Bandung: Bina Cipta.

Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2009, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

_____, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Bina Aksara.

Ninie Suparni, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politea.
- Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satochid Kartanegara, 1997. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Tongat, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009. *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yan Pramadya Puspa, 1977. *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu.